

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH
YUDI SARENA**

05966/2008

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

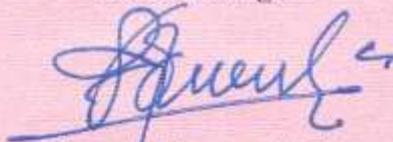
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO**

Nama : Yudi Sarena
BP/NIM : 2008/05966
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

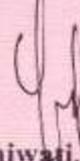
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

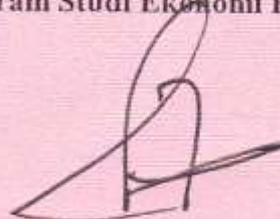
Pembimbing II



Yeniwati, SE, ME
NIP. 19760222 200501 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO

Nama : Yudi Sarena
BP/NIM : 2008/05966
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2016

Tim penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Akhirmen, M.Si

1.

Sekretaris : Yeniwati, SE, ME

2.

Anggota : Drs. Zul Azhar, M.Si

3.

Anggota : Dewi Zaini Putri, SE, MM

4.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature in blue ink. 2. A smaller signature in blue ink. 3. A signature in black ink. 4. A signature in black ink.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI SARENA
NIM/Thn. Masuk : 05966 / 20098
Tempat/Tgl Lahir : Sawahlunto / 09 November 1990
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln Sungai Deli Ujung Lapai
No. HP/telp : 081266250562
Judul Skripsi : Faktor-Faktr Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah, dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2016

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
6000
RUPIAH
YUDI SARENA
05966 / 2008

ABSTRAK

Yudi Sarena (05966/2008) : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto di bawah bimbingan Drs. Akhirmen, M.Si dan Yeniwati, S.E, M.E.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2) Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3) Pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4) Pengaruh secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan asosiatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1984 sampai 2014 dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif dan induktif yaitu: uji prasyarat OLS dan uji normalitas, asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas), uji hipotesis (uji t dan uji f). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan (4) secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibuk Yeniwati, SE, ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibuk Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Ibuk Yeniwati, SE, ME selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing selama belajar di Fakultas Ekonomi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Privinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda Tercinta serta adik-adik saya yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2008.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Februari 2016

Penulis

YUDI SARENA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN	
 HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	13
1. Pendapatan Asli Daerah	13
2. Produk Domestik Regional Bruto	24
3. Jumlah Penduduk	25
4. Inflasi	28
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD	32
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Konseptual	40
D. Hipotesis Penelitian	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Variabel Penelitian	44
F. Defenisi Operasional	45
G. Teknik Analisis Data	46
1. Analisis Deskriptif	46
2. Analisis Induktif	46
a. Uji Asumsi Klasik	46
b. Analisis Regresi Linear Berganda	50
c. Koefesien Determinasi (R^2)	51
d. Pegujian Hitotesis	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	54
a. Keadaan Geografis Kota Sawahlunto	54
b. Perekonomian Kota Sawahlunto	55
2. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	56
a. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto	56
b. Deskripsi PDRB Kota Sawahlunto	60
c. Deskripsi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto	62

d. Deskripsi Inflasi Kota Sawahlunto	66
3. Analisis Induktif	68
B. Pembahasan	77
1. Pengaruh PDRB (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto	77
2. Pengaruh Jumlah Penduduk (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto	79
3. Pengaruh Inflasi (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto	80
4. Pengaruh secara bersama-sama PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009-2014.....	3
2. Kontribusi PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Tahun 2009 dan 2013.....	6
3. Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010-2014.....	8
4. Nilai Durbin Watson	48
5. Pendapatan Asli Daerah dan Laju Pertumbuhan Sawahlunto (Ribu Rp) tahun 1984-2014	58
6. Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Kota Sawahlunto Tahun 1984-2014	61
7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Sawahlunto Tahun 1984-2014.....	64
8. Inflasi dan Laju Pertumbuhan Kota Sawahlunto Tahun 1984-2014.....	67
9. Hasil Estimasi Untuk Uji Multikolinearitas.....	70
10. Hasil Uji Autokorelasi.....	70
11. Uji Heterokedatisitas.....	72
12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	73

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Kerangka Konseptual Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto	41
2. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Jarque-Bera</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	88
3. Jumlah Penduduk	89
4. Inflasi	90
5. Hasil Uji Normalitas Residual	91
6. Hasil Uji Heterokedasitas	92
7. Hasil Uji Autokorelasi (Lag 1)	93
8. Hasil Uji Multikolinearitas	94
9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia harus siap menghadapi reformasi pemerintahan berupa otonomi daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksanaannya. Pemerintah pusat sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah bertanggung jawab agar otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya desentralisasi ke daerah sebagai harapan yang menjanjikan, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Di sinilah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Oleh karena itu daerah harus mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkatkan pendapatannya yang tentu saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2009-2014:

Tabel.1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto tahun 2009-2014

Tahun	Realisasi PAD	Laju Pertumbuhan %
2009	26.592,43	
2010	33.782,09	27,04
2011	36.382,15	7,70
2012	36.504,48	0,34
2013	37.041,57	1,47
2014	48.580,39	31,15

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2015

Tabel.1 menyajikan perkembangan PAD Kota Sawahlunto dari tahun 2009-2014 yang mana selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Ada pun perolehan PAD pada tahun 2009 yaitu sebesar 26.592,34 miliar rupiah. Hingga tahun 2014 naik menjadi 48.580,39 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi di bandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 31,15 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi di tahun 2012 yang hanya sebanyak 0,34 persen.

Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda, karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah dan besaran penduduk, sehingga memungkinkan masing-masing daerah memberi penekanan yang berbeda-beda pada setiap sektor pemasukan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat lebih dinominasi pada sektor pertanian. Dimana melihat indikator perkembangan ekonomi di Sumatera Barat dapat di cermati dari

perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota, sektor pertanian yang mendominasi pendapatan masyarakat di daerah-daerah di Sumatera Barat masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari proses dan penggunaan sumber daya dalam kegiatan produksi. Kemudian dilihat dari infrastruktur baik dari sektor publik seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian masih mendominasi masalah dan hambatan.

Peningkatan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan adanya sinergi dengan pemerintah daerah (lokal). Kebijakan dan atauran yang dibuat seyogyanya memiliki visi dan misi yang sama antar lembaga pemerintahan yang ada di pusat dengan daerah. Sehingga adanya daya tarik tersendiri diantara masing daerah-daerah dalam melihat peluang investor dalam berinvestasi atau menempatkan modalnya. Salah satu referensi atau ajuan dari beberapa investor dalam menempatkan modal di daerah adalah seberapa baik dan memadainya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dalam menunjang kegiatan produksi

Tabel.2
Kontribusi PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Tahun 2009 dan 2013

Lapangan Usaha	2009	Kontribusi %	2013	Kontribusi %
Pertanian	95737.53	9.73	174402.76	10.69
Pertambangan dan Penggalian	160673.40	16.32	130735.73	8.02
Industri Pengolahan	108799.80	11.05	176145.83	10.80
Listrik dan air bersih	13229.45	1.34	21002.17	1.29
Bangunan	72848.12	7.40	149289.98	9.15
Perdagangan, Hotel dan restoran	117389.34	11.93	211244.06	12.95
Pengangkutan dan Komunikasi	105501.81	10.72	191872.04	11.76
Keuangan, Persewaan dan Jasa Keuangan	52049.52	5.29	90152.55	5.53
Jasa-jasa	258023.66	26.22	486049.88	29.80
PDRB TOTAL	984252.63	100	1630894.99	100

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2014

Tabel.2 memperlihatkan peran PDRB Kota Sawahlunto atas dasar harga berlaku dari tahun 2009 dan tahun 2013, berdasarkan lapangan usaha. Peran sektor pertambangan terhadap total PDRB sangat besar, yaitu mencapai 16.32 persen tahun 2009, namun terus menurun hingga 8.02 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk sektor lainnya mengalami peningkatan.

Ini diakibatkan semakin berkurangnya produksi batubara dari tahun ke tahun seiring dengan menipisnya cadangan batubara yang ada, namun secara perannya masih sangat besar. Secara keseluruhan PDRB Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari total PDRB kota Sawahlunto tahun 2008 dan tahun 2012 yang disajikan pada tabel.2.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per orang (Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 1996). Pentingnya Variabel Jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave P dkk., dalam Sriyana (1999) besar kecilnya penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah serta retribusi daerah akan sangat di tentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan Kebijakan pemerintah.

Tabel.3
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
2010	56.866	
2011	57.567	1,23
2012	58.068	0,87
2013	58.972	1,56
2014	59.608	1,08

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Tabel.3 menyajikan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 57.567 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,23 persen. Hingga pada tahun 2014 meningkat menjadi 59.608 jiwa.

Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Karakteristik perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat, karena perekonomiannya sampai tahun

2000 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sub-sektor pertambangan non migas (batubara) sedangkan daerah lain pada umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian. Sekarang Kota Sawahlunto sebagai daerah yang sedang mengalami transisi perekonomian mengalami berbagai dinamika perkembangan sektor-sektor perekonomian dari tahun ketahun. Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2000 secara umum telah berangsur secara perlahan ke arah perbaikan. Ini ditandai dengan pertumbuhan yang positif di berbagai sektor perekonomian, walaupun belum secara maksimal dapat pulih dari krisis multi dimensi yang telah melanda negara ini sejak beberapa tahun terakhir.

Untuk lebih tertarik dengan penelitian tersebut di Kota Sawahlunto, Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Sehingga Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan segala potensi yang ada di Kota Sawahlunto memberikan gambaran positif terhadap tuntutan otonomi daerah, yaitu manajemen keuangan daerah yang baik, efisien dan efektif, serta kemampuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan PAD yang ada selama ini. Potensi perekonomian Kota Sawahlunto baik dari segi industri pengolahan maupun jasa-jasa, tentunya memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto baik melalui pajak-pajak maupun retribusi-retribusi yang

berhubungan dengan industri dan jasa-jasa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa mempengaruhi PAD Kota Sawahlunto.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh variabel-variabel makro dalam variabel penelitian ini yaitu PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap PAD kota Sawahlunto dalam skripsi yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto?
2. Seauhmana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto?
3. Seauhmana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto?
4. Seauhmana pengaruh secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.
2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.
3. Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.
4. Pengaruh secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi penulis
 1. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
 2. Untuk memperdalam kajian ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi pembangunan di bidang ekonomi publik.
2. Bagi Pembaca
 1. Agar penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, tentunya yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.
 2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah

Sebagai input bagi pemerintah daerah serta yang terlibat langsung dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sawahlunto.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga serta pinjaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain (HAW. Widjaja, 2002:110). Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD.

Pemerintah daerah harus melaksanakan keleluasaannya untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Intensifikasi

- 1) Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak serta retribusi daerah
- 2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi
- 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada

- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
- b. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).
Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan peningkatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey (terjemahan Amarullah, 1988:39-47), memberikan pengertian perpajakan daerah, yaitu:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah itu sendiri, termasuk besarnya pajak yang dipungut langsung dari masyarakat.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada pemerintah daerah, dan dibagi hasilnya dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya Kesit (2003:2) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri dari pengertian pajak daerah adalah pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik), pungutannya dapat dipaksakan, pungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pungutannya tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah. Dengan

memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 (Suryaningsih, 2013) pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:2-3);

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adail. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

- 3) Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu

(Mardiasmo, 2006:7):

- 1) *Official Assessment System* , adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Mardiasmo (2002:146-147) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan penerimaan dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang

dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah; a) Retribusi layanan kesehatan. b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. c). Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil.d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat. e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. f) Retribusi pelayanan pasar. g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. i) Retribusi penggantian biaya cetak peta. j) Rtribusi penyediaan/penyedotan kakus. k). Retribusi pengelolaan limbah cair. l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang. m) Retribusi pelayanan pendidikan. n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. b) Retribusi pasar grosir/pertokoan. c) Retribusi tempat pelelangan. d) Retribusi Terminal. e) Retribusi tempat khusus parkir. f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa. g) Retribusi rumah potong hewan. h) Retribusi pelayanan kepelabuhan. i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. j) Retribusi penyeberangan air. k) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; a) Retribusi izin mendirikan bangunan. b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. c) Retribusi izin gangguan. d) Retribusi Izin trayek. e) Retribusi izin usaha perikanan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 2002

yang menyatakan; Untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Mardiasmo, 2002:123).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Undang-undang no 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Penerimaan Jasa Giro.
- 3) Pendapatan Bunga.
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber PAD dalam APBD mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

Sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang

memberikan pelayanan jasa dengan imbalan sebagai sumber pendapatan daerah .

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut.

Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah/Provinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi daerah menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sumber daya alam dalam hal ini adalah sumber daya alam dalam arti seluas-luasnya. Jika suatu daerah sumber daya alamnya baik, maka faktor ini merupakan faktor yang turut menyukseskan keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Saragih,2003).

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat

pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Widarjono dalam Budiharjo, 2003:159).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika

jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Simon dalam Todaro (2003:92) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju, maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang, maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreativitas, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Todaro (2003:92) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong *economic of scale* dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja, sehingga pendapatan per kapita masyarakat akan cenderung

meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan penduduk pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sukirno, 2003:193).

4. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1994:155). Kenaikan harga dari satu/dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi.

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus (Sadono Sukirno, 2004:27). Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi.

Venieris dan Sebold dalam Anton Hermanto Gunawan (1991) mengungkapkan bahwa didalam definisi inflasi tercakup tiga aspek, yaitu:

- 1) Adanya “kecenderungan” (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

- 2) Peningkatan harga tersebut berlangsung “terus-menerus” (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, yakni akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya pada awal tahun saja.
- 3) Mencakup pengertian “tingkat harga umum” (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Penjelasan klasik mengenai terjadinya inflasi adalah masuknya uang terlalu banyak ke masyarakat, sehingga masyarakat semakin ingin membelanjakan uang mereka. Muncul pendapat bahwa jika pemerintah berhenti menciptakan dan mengedarkan banyak uang ke masyarakat, maka keinginan masyarakat untuk berbelanja dapat diredam dan dengan sendirinya inflasi akan menghilang. Solusi ini memang efektif saat terjadi hiperinflasi terjadi seperti di Jerman setelah perang dunia I. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya

Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (*hyper inflation*) (Sadono Sukirno, 2004:27).

Celah inflasi ini timbul karena golongan-golongan masyarakat berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif terhadap barang. Golongan-golongan masyarakat yang dimaksud yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Pemerintah berusaha memperoleh bagian lebih besar dari output masyarakat dengan cara mencetak uang baru. Pengusaha berusaha melakukan investasi dengan memperoleh modal dari kredit bank, serikat buruh atau pekerja memperoleh kenaikan upah. Hal ini terjadi karena permintaan total melebihi barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik (Mankiw, 2003:127).

Ada beberapa masalah sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi ($\geq 10\%$ pertahun), antara lain:

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat

Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap.

b. Makin buruknya distribusi pendapatan

Dampak buruk dari inflasi tingkat terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat Inflasi. Jika inflasi 20% pertahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% pertahun.

Persoalannya adalah jika inflasi mencapai 20% pertahun, sedangkan di masyarakat hanya segelintir saja yang mampu meningkatkan pendapatannya $\geq 20\%$ pertahun, akibatnya ada kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil (pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi $> 0\%$ pertahun). Tetapi sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil, distribusi pendapatan semakin memburuk.

c. Terganggunya stabilitas ekonomi

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (*ekspektasi*) para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya/biasanya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Akibatnya, permintaan barang dan jasa justru dapat meningkat.

Bagi produsen, perkiraan akan naiknya barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan, untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Tentu saja kondisi ekonomi semakin memburuk, yang akan mengakibatkan pendapatan berkurang.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD

1) Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$\text{a. Perkapita PNB} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{b. Perkapita PDB} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

PDRB akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen (dalam Mangkosoebroto, 2010:173) menjelaskan bahawa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

2) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Dalam pengertiannya penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap di dalam suatu wilayah, penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam konteks pasar ia berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Dalam konteks pembangunan pandangan penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan (Dumairi, 2004: 68).

Todaro (2000: 281) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah, melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang berdampak positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang.

Hal senada dikatakan oleh Sadono dan Sukirno (2001: 426) yang menyatakan penduduk adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan jumlah barang-barang konsumsi di pasar dan akhirnya terjadi perluasan pasar. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga mengakibatkan adanya perluasan usaha. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Adam Smith dalam Santosa dan Rahayu (2005), menjelaskan bahwa dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan

bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Santosa dan Rahayu, 2005: 15).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Budihardjo dalam Santosa dan Rahayu 2005:15).

Jadi dari teori dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah karena dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tingkat produksi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

3) Pengaruh Inflasi Terhadap PAD

Penelitian Simanjuntak dalam Halim (2001:101) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang

penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, dan ada istilah inflasi merayap yang diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang yang lambat (Sukirno, 2004:15).

Inflasi di daerah memiliki dampak positif dan dampak negatif-tergantungan parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hiperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasidan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha

dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca

pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek moneter, yang dalam hal ini inflasi lebih dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia, ternyata hanya memengaruhi sisi permintaan agregat. Sementara penawaran agregat lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sektor riil yang terjadi seperti kondisi musim yang memengaruhi produksi komoditi pertanian, kondisi distribusi barang dan sebagainya. (Syahril Sabirin, 2002 dalam Ikasari 2005).

Keynes tidak sependapat dengan pandangan yang diajukan dalam teori kuantitas. Teori kuantitas tersebut menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kenaikan tingkat harga, namun tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional.

Kemudian Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, namun juga ditentukan oleh kenaikan biaya produksi.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu

pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Menurut Sentosa dan Rahayu (2005) dalam penelitiannya Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. menyimpulkan bahwa dengan mengambil data dari laporan keuangan Kota Kediri, dengan populasi semua tahun periode anggaran dan sampel sebanyak 14 tahun yaitu tahun 1989-2002. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel makro yang terdiri dari PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran pembangunan yang merupakan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Andriani dan Handayani (2008) meneliti PAD di Kabupaten Merangin selama periode 1999-2006. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD. Tetapi secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan. PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat.

Triani dan Kuntari (2010) meneliti pengaruh variable makro terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar, hasilnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu meningkat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh

positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. Dan secara simultan variabel makro berpengaruh terhadap PAD.

C. Kerangka Konseptual

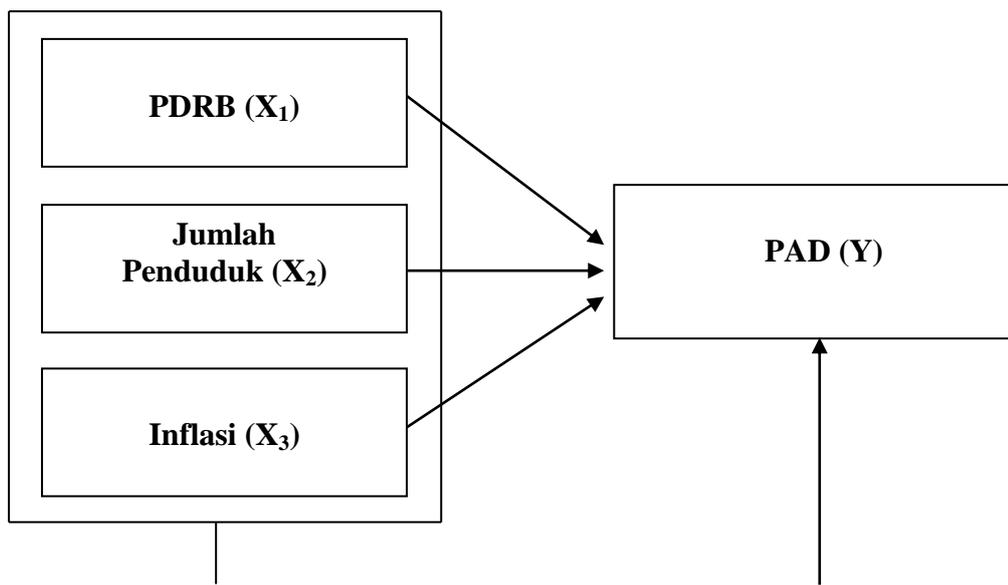
Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antar variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan berpijak pada kajian teori diatas. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto (Y) adalah PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Inflasi (X_3). dari hal tersebut dapat dibuat kerangka konseptual.

PDRB (X_1) dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto (Y) karena dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Jumlah Penduduk (X_2) juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto (Y) karena Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Inflasi (X_3) juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto (Y) karena

apabila harga barang atau jasa berubah maka akan menyebabkan perubahan penerimaan daerah. Dengan demikian semua variabel bebas akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto dan kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan dengan sebuah skema pada gambar berikut :



Gambar. 1
Kerangka Konseptual Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan kerangka konseptual di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Secara parsial Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto.

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi parsial } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan Analisis Regresi Linear Berganda dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Inflasi (X_3) terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB (X_1) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan probabilitas = $0,0128 < \alpha = 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar 6,125. Artinya apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka PAD meningkat sebesar 6,125 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB berkontribusi terhadap PAD di Kota Sawahlunto.
2. Jumlah Penduduk (X_2) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan probabilitas = $0,2255 > \alpha = 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar 1,1686. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berkontribusi terhadap PAD di Kota Sawahlunto.
3. Inflasi (X_3) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan probabilitas = $0,2516 > \alpha = 0,05$, dengan koefisien regresi sebesar -0,3625. Jadi dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berkontribusi terhadap PAD di Kota Sawahlunto.

4. Secara bersama-sama PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Inflasi (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto (Y) dengan probabilitas antara $0,0011 < \alpha = 0,05$. Besaran sumbangan ketiga variabel bebas dalam penelitian ini adalah 61,06 persen, berarti 38,94 persen Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Saran

Dari uraian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya serta hasil hipotesis penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat di ajukan saran saran sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto maka di sarankan pemerintah Kota Sawahlunto untuk gencar mempromposikan membayar berbagai pungutan (pajak dan retribusi daerah) kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya dan untuk menunjang kegiatan perekonomian.
2. Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan bahwa terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto maka disarankan

pemerintah untuk mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi para penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja diikuti dengan bertambahnya kualitas sumberdaya manusia yang baik akan mampu meningkatkan investasi yang secara langsung meningkatkan pendapatan dan menciptakan situasi yang kondusif.

3. Sehubungan dengan hasil penelitian yang ditemukan maka disarankan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, melakukan pengawasan harga dan menetapkan harga maksimal, serta mendorong pengusaha menaikkan hasil produksinya mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi subsidi kepada sektor produksi bahan bakar dan produksi beras.
4. Sehubungan dengan hasil penelitian dikemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto maka di sarankan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam urusan pelaksanaan rumah tangganya, perlu diusahakan ketidaktegantungan keuangan daerah terhadap bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggali potensi PAD yang baru dengan cara menginventarisir kembali berbagai potensi di wilayah dengan akurat yang dapat diandalkan sebagai penopang keuangan daerah. Meningkatkan peranan lapangan usaha yang memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB sehingga dapat menambah penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2001. *"Akuntansi Keuangan Daerah"*. Salemba Empat: Jakarta
- Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani. 2008. *"Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin"*. (diunduh dari [www.http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/820816.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/820816.pdf)).
- Bastian, Indra. 2002. *"Sistem Akuntansi Sektor Publik"*. Salemba 4: Jakarta.
- Boediono. 1999. *"Teori Pertumbuhan Ekonomi"*. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1984 - 2014. *Sawahlunto Dalam Angka*. Berbagai edisi
- Badan Pusat Statistik. 1984 - 2014. *Sumatera Barat Dalam Angka*. Berbagai edisi
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *"Komposisi penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional"*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Davey, K J. 1988. *"Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevasinya Bagi Dunia Ketiga"*. Terjemahan oleh Amarullah dkk. UI Press: Jakarta.
- Dumairi. 2004. *"Perekonomian Indonesia"*. Erlangga: Jakarta
- Gujarati, Damodar. 1999. *"Ekonometrika Dasar"*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga: Jakarta.
- _____ . 2006. *"Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga"*. Jilid 2. Erlangga: Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *"Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah"*. Rineka Cipta: Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Grafindo: Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. *"Pajak dan Retribusi Daerah"*. UII press: Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *"Ekonomi Publik"*. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2010. *"Ekonomi Publik"*. Edisi Ketiga. BPFE UGM: Yogyakarta.